

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

A. Landasan Teori

Penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* dan kompensasi bonus terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2014-2018

1. Teori Keagenan (*agency Theory*)

Teori Keagenan atau *agency theory* merupakan gambaran hubungan antara pihak yang memiliki wewenang yakni investor yang biasa disebut dengan *principal* dengan para manajer yang merupakan *agent* yang diberikan wewenang. Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham, dan antara manajer dan pemberi pinjaman. Dalam perusahaan yang telah *gopublic*, hubungan keagenan dicerminkan oleh hubungan antara investor dan manajemen perusahaan. Persoalannya adalah diantara kedua pihak tersebut seringkali terjadi perbedaan kepentingan. Perbedaan tersebut mengakibatkan keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan kurang mengakomodasi kepentingan pihak pemegang saham. Teori agensi menjelaskan ketika pemilik tidak dapat memonitor secara sempurna aktivitas manajemen, maka secara potensial manajemen dapat menentukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan level kompensasinya. besarnya kompensasi yang diterima oleh pihak manajemen (*agent*) tergantung pada

besarnya laba profit yang dihasilkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pihak pemilik (Sunarto,2009).

Konsep *Agency Theory* Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) yang berpendapat bahwa hubungan *principal* dan agen, *Principal* memperkerjakan agen untuk kepentingan *principal* seperti pada dewan komisaris independen memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen dengan adanya anggota independen dalam bersikap dan berpendapat maka akan membuat kinerja menjadi efektif, konsep teori keagenan yang berpendapat bahwa semakin besar proporsi anggota yang memiliki keahlian dibidang akuntansi maupun keuangan maka pelaporan keuangan yang dibuat akan lebih berkualitas.

Agency theory dimana Agen memiliki kepentingan sendiri yakni untuk mendapatkan kompensasi/bonus/insentif/remunerasi yang besar atas kinerjanya. Maka termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain memperoleh investasi, pinjaman maupun kontrak kompensasi. Prestasi Agen dinilai berdasarkan kemampuan memperoleh laba, maka harga saham dan dividen pun akan meningkat, dan agen pun akan dianggap berhasil/berkinerja baik sehingga layak mendapatkan insentif yang tinggi. Namun, tidak ada pengawasan yang memadai, sang agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai demi memenuhi tuntutan Prinsipal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi. Eisenhardt (1989).

Agency theory memberikan gambaran bahwa masalah manajemen laba dapat dieleminasi dengan pengawasan sendiri melalui *good corporate governance*. Bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring untuk menyelaraskan ketidaksejajaran kepentingan pemilik dan manajemen (Adrianto dan Anis,2014).

2. Manajemen Laba (*Earning Management*)

Menurut Midaistuty (2003) Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba. Manajemen laba diukur menggunakan *discretionary accrual* (DAC) digunakan sebagai proksi karena merupakan komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer seperti penjualan kredit.

Untuk mengukur DAC, terlebih dahulu akan mengukur total akrual. Dalam penelitian ini mengambil pengukuran model Jones dimodifikasi. Jika nilai *discretionary accrual* positif maka perusahaan diduga melakukan praktik manajemen laba dengan pola menaikkan laba (*income increasing*), jika nilai *discretionary accrual* negatif maka perusahaan diduga melakukan praktik manajemen laba dengan pola menurunkan laba (*income decreasing*), dan jika nilai *discretionary accrual* 0 (nol) maka perusahaan diduga tidak melakukan praktik manajemen laba.

Menurut Pujiati dan Arfan (2013), untuk mengukur tingkat manajemen laba digunakan *discretionary accruals* dan dihitung dengan

The Modified Jones Model (1991) sebagaimana digunakan oleh (Dechow, et al. 1995). Alasan pemilihan model Jones yang dimodifikasi ini karena model ini dianggap sebagai model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dibandingkan dengan model lain serta memberikan hasil yang paling kuat (Dechow, et al. 1995).

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Nilai Total Accrual (TAC) yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (Ordinary Least Square) sebagai berikut :

$$\left(\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}}\right) = \beta_1\left(\frac{1}{A_{it-1}}\right) + \beta_2\left(\frac{\Delta REV_t - \Delta RECT}{A_{it-1}}\right) + \beta_3\left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}}\right)$$

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas, nilai *non discretionary accruals* (NDA) dapat dihitung dengan rumus :

$$NDA_{it} = \beta_1\left(\frac{1}{A_{it-1}}\right) + \beta_2\left(\frac{\Delta REV_t - \Delta RECT}{A_{it-1}}\right) + \beta_3\left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}}\right)$$

Selanjutnya discretionary accruals (DA) dapat dihitung sebagai berikut :

$$DA_{it} = \frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan :

TAC_{it} = Total Accruals perusahaan i pada periode t

DA_{it}	= Discretionary Accruals perusahaan i pada periode t
NDA_{it}	= Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode t
NI_{it}	= Laba bersih perusahaan i pada periode t
CFO_{it}	= Aliran kas dari aktiva operasi perusahaan i pada periode t
A_{it-1}	= Total aktiva perusahaan i pada periode t
ΔREV_{it}	= Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun $t-1$ ke tahun t
ΔREC_{it}	= Perubahan piutang perusahaan i dari tahun $t-1$ ke tahun t
PPE_{it}	= Aktiva tetap (bruto) perusahaan i pada periode t
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
e	= Komponen Error

3. Corporate Governance

a. Pengertian GCG

Menurut Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI, 2001) corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sedangkan *Cadbury Committee* menyatakan *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal

maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka. Berdasarkan definisi *good corporate governance* di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *good corporate governance* adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Manfaat *Corporate Governance* menurut Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI, 2001) adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen.

b. Prinsip GCG

Terdapat lima komponen atau konsep atau prinsip utama yang diperlukan dalam konsep GCG yaitu yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang kita biasa kita kenal dengan konsep TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*) (dalam anonymous 2015:5), konsep inilah yang nantinya akan banyak dibahas dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu organisasi atau perusahaan. Secara singkat, menurut pendapat dan sejauh pemahaman saya mengenai konsep TARIF tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. *Transparency*, konsep ini diperlukan dalam menjaga objektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis dengan memberikan informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan semakin berkembangnya teknologi dewasa ini, tidak menjadi suatu alasan bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk tidak dapat melakukan inisiatif untuk mengungkapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang sangat diperlukan oleh para pemangku kepentingan.
2. *Accountability*, konsep ini diperlukan untuk melihat sejauhmana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi dan perusahaan. Dalam hal ini suatu kinerja haruslah dapat dikelola dengan tepat dan

terukur untuk melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Dalam konsep ini pula, organisasi dan perusahaan harus mampu menjawab segala pertanyaan yang akan diajukan oleh para pemangku kepentingan atas apa yang telah diperbuat dan hasil yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri.

3. *Responsibility*, konsep ini merefleksikan tanggung jawab setiap individu maupun organisasi atau perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugas dalam pekerjaan, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, bukan hanya terbatas pada tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan antara atasan dengan bawahan, namun tanggung jawab organisasi atau perusahaan kepada para pemangku kepentingan hingga masyarakat sekitar. Sehingga dalam konsep ini, organisasi atau perusahaan harus mampu mempertanggung jawabkan segala hal yang berkaitan dengan aturan, hukum dan peraturan yang berlaku sebagai kontribusi hubungan hierarki internal perusahaan, pemangku kepentingan, masyarakat serta *stakeholders* lainnya.
4. *Independency*, konsep ini dapat dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi dan perusahaan yang dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya. Dalam hal ini, organisasi atau perusahaan harus memiliki tata kelola yang efektif dan efisien dan

mampu melakukannya sendiri tanpa ada dominasi atau intervensi dari pihak lain, serta mampu dalam menggunakan dan memanfaatkan nilai-nilai (*values*) yang ada pada organisasi atau perusahaan itu sendiri untuk dapat dijadikan *unique point* diantara organisasi dan perusahaan lainnya, sehingga mampu bersaing dalam bidang bisnis yang serupa.

5. *Fairness*, konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan *stakeholders* lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan porsi masing-masing. Hakikatnya setiap bagian dalam organisasi atau perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi untuk organisasi atau perusahaan. Sehingga, konsep ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan atau sebagai motivasi bagi setiap bagian dari organisasi atau perusahaan, karena mereka akan memiliki rasa dan kesempatan yang sama dalam memberikan kontribusi kepada organisasi atau perusahaan, sehingga akan memacu setiap individu dalam berkompetisi untuk memberikan yang terbaik kepada organisasi atau perusahaan tersebut.

Bedasarkan penjelasan dari kelima konsep di atas, konsep ini sangat diperlukan bagi organisasi atau perusahaan dalam menerapkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG), yang mana konsep ini dapat dijadikan sebagai standar pengukuran kesesuaian dan penyimpangan dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Konsep ini juga dapat

digunakan melihat sejauh mana organisasi atau perusahaan dalam mengelola sumber daya yang tersedia dan dapat diinformasikan, dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanyakan alokasinya kepada para pemangku kepentingan. Disamping itu, melalui konsep ini pula, dapat dilihat pula sejauhmana organisasi atau perusahaan mampu memberikan melakukan tata kelolanya sendiri dan tetap pada jalur yang tepat dalam mencapai tujuan, dengan memperhatikan penyerataan kesempatan yang ada kepada seluruh bagian organisasi atau perusahaan yang disesuaikan pada porsi dan kemampuannya masing-masing.

c. Penerapan GCG

penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakan *good corporate governance* di Indonesia.

Penerapan *Good Corporate Governace* harus memeperhatikan hukum, peraturan, dan kaidah yang wajib dipenuhi, sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan secara efisein dan menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun semua pihak secara keseluruhan. Penerapan prinsip GCG ini untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien, melalui harmonisasi manajemen perusahaan. Dibutuhkan peran yang

penuh komitmen dan independen dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan kegiatan perusahaan, sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Sebelum menerapkan GCG, Manajemen harus memenuhi keempat prinsip GCG, maka penerapan GCG dapat dilakukan. Dalam mengimplementasikan GCG, perusahaan membutuhkan alat sebagai indikator tercapai atau tidaknya GCG yang dilakukan. Beberapa alat tersebut adalah kepemilikan Manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit (Hidayanti dan Paramita,2014).

d. Dewan Komisaris Independen

Tugas dewan komisaris adalah mengawasi sekaligus memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Sedangkan direksi sendiri bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang perlu diperhatikan adalah mengenai independensi dewan komisaris. Independensi yang dimaksud disini adalah anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan manajemen maupun dengan perusahaan melalui transaksi-transaksi yang jumlahnya signifikan, hubungan keluarga, dan hubungan-hubungan lainnya yang dapat menyebabkan komisaris independen tidak dapat berpikir secara objektif. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/PJOK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bersal dari luar perusahaan dan telah

memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen yang ditetapkan. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa komisaris independen setidaknya paling sedikit berjumlah 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Menurut Hidayanti dan Paramita (2014) komposisi dewan komisaris mampu mempengaruhi manajemen dalam menyusun laporan keuangan melalau perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan yang akan berdampak pada perolehan laba yang benar benar berkualitas. Kondisi ini menjadi sangat penting karena kepentingan pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba kan berakibat pada ketidak akuratan laporan keuangan sehingga akan berkurangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut. Rumus yang digunakan adalah : jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dibagi dengan seluruh anggota dewan komisaris perusahaan.

$$DK = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Luar}}{\text{Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

e. Komite Audit

Komite audit menurut Kep.29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelola perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh suatu perusahaan berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan ,akuntansi dan penegendalian intern. Selain itu keberadaan komite audit juga berfungsi untuk membantu

dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan (Guna dan Herawati 2010).

Jumlah minimal anggota komite audit yang harus dimiliki oleh perusahaan berdasarkan Peraturan Jasa Otoritas Keuangan N0.55/PJOK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yaitu paling sedikit sebanyak 3 orang anggota. Komite audit diharapkan dapat mengatasi kecenderungan peningkatan berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian pihak manajemen. Komite audit berperan dalam mengawasi berbagai tindakan pihak manajemen dan memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang disampaikan direksi. Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan, maka dapat memperkecil tindakan pihak manajemen memanipulasi laba (Lidiawati,2016)

Tujuan dari keberadaan komite audit di perusahaan seperti yang diungkapkan (Susiana dan Herawati, 2007) adalah : 1) Memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta disajikan secara wajar dan tidak menyesatkan, 2) Memberikan kepastian bahwa pengendalian internal perusahaan telah memadai, 3) melakukan pengawasan dan menindaklanjuti kemungkinan penyimpanan material dalam bidang keuangan dan implikasi hukumnya, 4) Memberikan

rekomendasi dalam auditor eksternal yang akan melakukan audit di perusahaan. Menurut (Guna dkk, 2012) komite audit merupakan suatu komponen yang baru dalam perusahaan yang memiliki peranan sangat vital sebagai sistem pengendalian perusahaan. Komite audit dipilih oleh dewan komisaris untuk mengawasi sistem pengendalian akuntansi perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif mampu membuat kinerja perusahaan berjalan lebih baik. Komite audit dihitung dari jumlah anggota.

$$KA = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

f. Kompensasi Bonus

Kompensasi bonus adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Menurut Pujiati dan Arfan, (2013) pemberian bonus seringkali dikaitkan dengan tingkat laba bersih yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan. Manajer akan berusaha mengatur laba bersih yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan. Manajer akan berusaha mengatur laba bersih sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan bonusnya. Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan yang sebenarnya akan bertindak oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan maksimal laba saat ini ataupun menyimpannya untuk tahun-tahun yang akan datang. Menurut Wijaya dan Cristiawan (2014) menyatakan bahwa kompensasi bonus diukur dengan variabel dummy dimana perusahaan yang memberikan

kompensasi akan diberi nilai 1 (satu) dan jika tidak memberikan kompensasi akan diberi nilai (0).

g. Hasil penelitian terdahulu

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait mengenai *good corporate governance* dan kompensasi bonus terhadap manajemen laba.

Tabel 2.1

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Anggana dan Prastiwi (2013)	Analisis Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Praktik Manajemen laba	X ₁ = Komisaris independen X ₂ = Komite Audit X ₃ = Kualitas Auditor Eksternal X ₄ = Kepemilikan Manajerial Y = Praktik Manajemen Laba	1) Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba 2) Komite Audit tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba 3) kualitas Auditor Eksternal berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba 4) Kepemilikan Manajerial berpengaruh Negatif terhadap praktik Manajemen Laba.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
2	Manuhutu (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba	X ₁ = Kepemilikan Manajerial X ₂ = Kepemilikan institusional X ₃ = dewan direksi X ₄ = Komite Audit X ₅ = kompensasi bonus Y = Mamajemen Laba	1) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 2) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba 3) Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba 4) komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 5) kompensasi bonus tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba
3	Anisa Elfira (2014)	Pengaruh kompensasi bonus dan <i>Leverage</i> terhadap manajemen laba	X1 = Kompensasi bonus X2 = Leverage Y = Manajemen Laba	1) Kompensasi Bonus berpengaruh terhadap manajemen laba
4	Rahmawati (2013)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> terhadap Manajemen Laba	X ₁ = Dewan Komisaris Independen X ₂ = Komite Audit X ₃ = Kepemilikan Manajerial Y = Manajemen Laba	1) Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 2) komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 3) kepemilikan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
				manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
5	Suaidah dan Utomo (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan profitabilitas terhadap manajemen laba	X ₁ = komite audit X ₂ = komisaris independen X ₃ = kepemilikan manajerial X ₄ = <i>Profitabilitas</i> Y = Manajemen Laba	1) komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 2) komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 3) kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
6	Achmad Sutarmin (2017)	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Praktik Manajemen Laba	X ₁ = Komite Audit, X ₂ = Ukuran Dewan Komisaris X ₃ = Dewan Komisaris Independen X ₄ = Kepemilikan Manajerial X ₅ = Kepemilikan Institusional Y = Praktik manajemen Laba	1) komite audit tidak terdapat pengaruh terhadap praktik manajemen laba 2) ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 3) Dewan komisaris independen, berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba 4) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
				5) Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap praktik manajemen laba
7	Dustriyani dan Nazar (2015)	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan Kompensasi bonus terhadap manajemen laba	X1 = dewan komisaris independen X2 = kepemilikan manajerial X3 = komite audit independen X4 = kompensasi bonus Y = Manajemen Laba	1) Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 2) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 3) Komite Audit independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 4) kompensasi bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
8	Fatmawati (2016)	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> terhadap manajemen laba	X1 = Dewan direksi X2 = komite audit X3 = ukuran dewan komisaris Y = Manajemen Laba	1) Dewan direksi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba 2) komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen Laba 3) Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
				terhadap manajemen laba
9	Pujiarti dan Arfan (2013)	Struktur kepemilikan dan kompensasi bonus serta pengaruhnya terhadap manajemen laba	X1 = Kepemilikan Manajerial X2 = Kepemilikan Instiusional X3 = Kompensasi Bonus Y = Manajemen Laba	1) Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 2) kepemilikan instiusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 3) Kompenasi bonus berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
10	Sari dan Putri (2014)	Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba	X1 = Kepemilikan Manajerial X2 = Proporsi Dewan Komisaris Independen X3= Komite Audit X4 = Kepemilikan Instiusional Y = Manajemen Laba	1) Kepemilikan Manajerial berpengaruh Negatif 2) Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh Negatif 3) Komite Audit berpengaruh Negatif 4) Kepemilikan Instiusional tidak berpengaruh Negatif
11	Murtini dan Mansyur (2012)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba	X1= Kepemilikan Manajerial X2 = Kepemilikan Instiusional X3 = Ukuran Dewan Komisaris X4 = Komisaris Independen Y = Manajemen Laba	1) Kepemilikan Manajerial berpengaruh Negatif terhadap Manajemen Laba 2) Kepemilikan Instiusional tidak berpengaruh Negatif

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
				terhadap Manajemen Laba 3) Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh Positif terhadap Manajemen Laba 4) Komisaris Independen Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen Laba

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tujuan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengenai pengaruh dewan komisaris independen, komite audit dan kompensasi bonus terhadap manajemen laba.

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris, yang secara umum bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Menurut Achmad Sutarmin (2017), Dewan komisaris independen, berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba

Menurut Fatmawati (2016), Manuhutu (2016) Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut

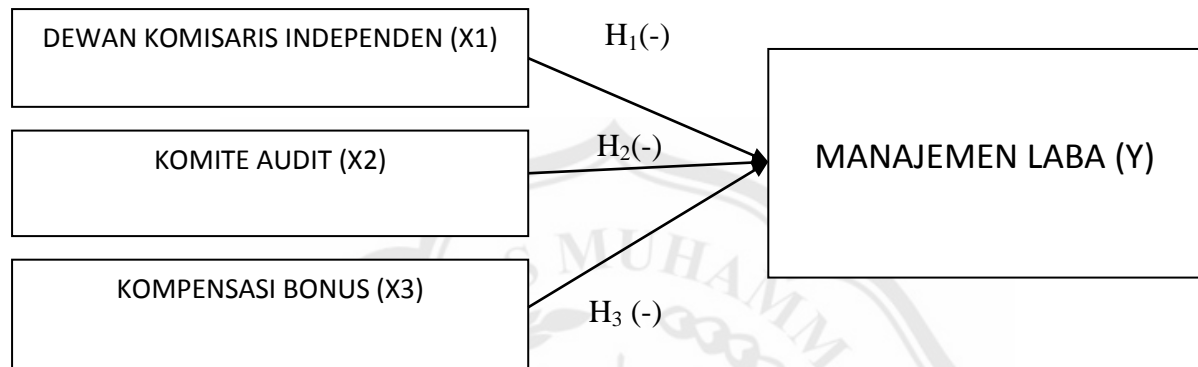
membuktikan bahwa semakin banyak jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi manajer akan melakukan praktik manajemen laba atau tidak. Dalam hasil penelitian ini praktik manajemen laba justru mungkin dapat terjadi saat perusahaan memiliki jumlah komite audit yang lebih banyak dimana seharusnya diharapkan dapat meminimalisasi praktik manajemen laba.

Kompensasi bonus, pemberian bonus seringkali dikaitkan dengan tingkat laba bersih yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan. Manajer akan berusaha mengatur laba bersih sedemikian rupa sehingga memaksimalkan bonusnya. Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan yang sebenarnya akan bertindak oportunis untuk melakukan Manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini atau menyimpan untuk tahun-tahun yang akan datang (Pujiati dan Arfan,2013). Hasil penelitian Pujiati dan Arfan (2013) bahwa kompensasi bonus berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dimana pengaruh negatif tersebut karena semakin besar kompensasi bonus yang diberikan kepada manajemen semakin rendah tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan tersebut, sebaliknya jika semakin kecil kompensasi bonus yang diberikan kepada manajemen semakin tinggi tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan.

Oleh karena itu, dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut untuk menguji apakah dewan komisaris independen, komite audit dan kompensasi bonus

memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Model dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1



F. HIPOTESIS

Kerangka pemikiran diatas menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kompensasi Bonus dapat dirumuskan hipotesis sementara dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Tugas dewan komisaris adalah mengawasi sekaligus memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Sedangkan direksi sendiri bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang perlu diperhatikan adalah mengenai independensi dewan komisaris. Independensi yang dimaksud disini adalah anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan manajemen maupun dengan perusahaan melalui transaksi-transaksi

yang jumlahnya signifikan, hubungan keluarga, dan hubungan-hubungan lainnya yang dapat menyebabkan komisaris independen tidak dapat berpikir secara objektif. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/PJOK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bersal dari luar perusahaan dan telah memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen yang ditetapkan. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa komisaris independen setidaknya paling sedikit berjumlah 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Guna dan Herawati (2010). Komisaris independen dinyatakan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada penelitian Dustriyani dan Nazar (2015), Sari dan Putri (2014) dengan demikian penelitian menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Komite audit menurut Kep.29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelola perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh suatu perusahaan berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Selain itu keberadaan komite audit juga berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan (Guna dan Herawati 2010).

Komite audit diharapkan dapat mengatasi kecenderungan peningkatan berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian pihak manajemen. Komite audit berperan dalam mengawasi berbagai tindakan pihak manajemen dan memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang disampaikan direksi. Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan, maka dapat memperkecil tindakan pihak manajemen memanipulasi laba (Lidiawati, 2016).

Komite audit dinyatakan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada penelitian Sari dan Putri (2014), Manuhutu (2016).

Dengan demikian peneliti menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₂: Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

3. Pengaruh Kompensasi Bonus terhadap Manajemen Laba

Kompensasi bonus adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Pemberian bonus seringkali dikaitkan dengan tingkat laba bersih yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan. Manajer akan berusaha mengatur laba bersih sedemikian rupa sehingga memaksimalkan bonusnya. Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan yang sebenarnya akan bertindak oportunis untuk melakukan Manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini atau menyimpan untuk tahun-tahun yang akan datang (Pujiati dan Arfan, 2013).

Semua bentuk pendapatan baik berupa barang langsung maupun tidak langsung, atau bentuk pendapatan yang berbentuk uang yang telah diterima karyawan atas tenaga dan pikiran yang telah disumbangkan kepada perusahaan merupakan definisi dari kompensasi berupa bonus. Apabila ada hubungan antara kepegawaian dengan perusahaan yang terikat maka kompensasi yang diterima pegawai berupa timbal balik atau jasa yang telah diberikan kepada perusahaan yakni jasa sebagai karyawan. Dalam hal ini kompensasi biasanya berbentuk uang, disebabkan banyaknya pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Lain halnya jika perusahaan memberi kompensasi secara langsung misalnya karyawan mendapatkan kompensasi non moneter berupa liburan, pendidikan dan lain lain. Azizi, dkk(2018). Menurut Pujiarti dan

Arfan (2013) Kompensasi bonus berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dengan demikian peneliti menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₃ : Kompensasi bonus berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

